

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 mengatur pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPIP bertugas merumuskan arah kebijakan, menyusun program, melakukan koordinasi, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan BPIP bertujuan memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, sehingga Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa yang relevan dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan global.

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, perilaku, serta pola pikir warga negara. Pancasila bukan hanya menjadi fondasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi sumber nilai yang mengarahkan seluruh aktivitas masyarakat Indonesia. Namun, di tengah perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan arus budaya asing yang semakin deras, nilai-nilai Pancasila sering kali mengalami tantangan, baik dalam pemahaman maupun pengamalan, terutama di kalangan generasi muda.

Generasi muda, khususnya pelajar SMK/SMA, berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh eksternal. Paparan informasi

yang cepat dan masih melalui media sosial, ditambah dengan kurangnya filter terhadap konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, berpotensi melemahkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Fenomena seperti menurunnya sikap gotong royong, individualisme yang meningkat, dan berkurangnya penghargaan terhadap keberagaman menjadi indikasi bahwa internalisasi ideologi Pancasila memerlukan perhatian serius.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertugas memelihara persatuan, kesatuan, serta stabilitas politik dan keamanan. Salah satu wujud peran tersebut adalah melalui Program Pembinaan Ideologi Pancasila, yang ditujukan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di berbagai kalangan, termasuk pelajar SMK/SMA. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran ideologis yang kuat, sehingga generasi muda memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif.

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tantangan tersendiri dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. Keberagaman latar belakang pelajar, keterbatasan fasilitas, serta pengaruh perkembangan teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembinaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas program pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi penting, khususnya untuk melihat bagaimana program tersebut berdampak pada pelajar SMA/SMK sebagai kelompok strategis dalam pembangunan bangsa ke depan.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, penulis menemukan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan secara rutin setiap tahun, namun hasil yang terlihat di lapangan masih belum maksimal. Masih ditemukan sejumlah pelajar yang belum sepenuhnya memahami makna, peran, dan fungsi ideologi Pancasila.

Sumber : Hasil Observasi

2. Tingkat keterlibatan pelajar dalam mengikuti kegiatan ideologi kebangsaan, seperti sosialisasi masih rendah. Banyak pelajar kurang antusias mengikuti kegiatan tersebut karena dianggap membosankan atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. *Sumber : Hasil*

Observasi

3. Kurangnya evaluasi berkelanjutan terhadap capaian program dan efektivitas metode pendekatan yang digunakan masih terbatas, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana program berhasil mengubah pemahaman dan sikap pelajar. *Sumber : Hasil Observasi*

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi yang subjektif terkait tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, dan mengangkatnya dalam sebuah judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS PENDIDIKAN FORMAL PADA PELAJAR SMK/SMA)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Efektivitas program pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Pendidikan formal pada pelajar SMK/SMA), yang akan diteliti agar tidak melebar pembahasan ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rossi, Lipsey, & Henry (2019: 60), efektivitas program dianalisis melalui beberapa komponen berikut:

1. *Input* Program
2. Proses Pelaksanaan Program
3. *Output* Program (hasil langsung)
4. *Outcome* Program (dampak jangka menengah/panjang)
5. Evaluasi Berkelanjutan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program pembinaan ideologi pancasila oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten hulu sungai utara (Studi kasus pendidikan formal pada pelajar SMK/SMA)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program pembinaan ideologi pancasila oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten hulu sungai utara (Studi kasus pendidikan formal pada pelajar SMK/SMA)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diantaranya Adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Pendidikan formal pada pelajar SMK/SMA).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Pendidikan formal pada pelajar SMK/SMA).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmiah mengenai efektivitas program pembinaan ideologi Pancasila, memberi kontribusi pada pengembangan teori evaluasi program pemerintah di tingkat daerah, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait pendidikan karakter dan peran lembaga dalam memperkuat wawasan kebangsaan pelajar.

2. Manfaat secara Praktis

- a) Bagi Kesbangpol Hulu Sungai Utara: Memberikan masukan dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila, termasuk perbaikan metode, media, dan evaluasi program.

- b) Bagi Sekolah (SMA/SMK): Menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung dan mengintegrasikan kegiatan pembinaan ideologi ke dalam program pendidikan karakter.
- c) Bagi Pelajar: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga stabilitas sosial dan politik sebagai bagian dari ketahanan nasional.

